

## Analisis penyajian laporan keuangan tahunan koperasi berbasis SAK ETAP dan perpajakan

**Lenda Komala**

Universitas Yarsi

[lenda.komala@yarsi.ac.id](mailto:lenda.komala@yarsi.ac.id)

---

### Abstrak

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) untuk Koperasi memungkinkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan dapat menghasilkan informasi dan persepsi yang sama bagi semua yang berkepentingan, baik pihak internal yaitu anggota dan pelanggan, maupun pihak eksternal seperti pemerintah dalam hal kaitannya dengan kewajiban perpajakan penghasilan koperasi dan pajak para pengurusnya. Metode penelitian deskriptif kualitatif dilakukan pada Koperasi di Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, sebanyak 31 koperasi dengan kegiatan usaha simpan pinjam, penjualan produk, dan jasa lainnya, untuk tujuan memperoleh informasi dan gambaran penerapan SAK ETAP oleh Koperasi yang dikelola oleh BUMN, Pemda, Swasta, dan Yayasan dalam menyajikan laporan keuangan tahunan, dengan metode analisis deskriptif. Hasil Penelitian menyatakan Koperasi yang dikelola anak perusahaan BUMN telah menerapkan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan untuk koperasi yaitu SAK ETAP, Koperasi yang dikelola Pemda, Swasta dan Yayasan belum sepenuhnya menerapkan SAK ETAP, dalam penyajian laporan keuangannya. Penerapan SAK ETAP yang belum sepenuhnya diterapkan di koperasi berdampak ketidakakuratan perhitungan pajak koperasi.

**Kata Kunci:** Koperasi, Laporan Keuangan, SAK ETAP, Pajak Koperasi

### Abstract

*Application of ETAP Financial Accounting Standards (Entities Without Public Accountability) for Cooperatives enables the preparation and presentation of financial reports to produce the same information and perceptions for all interested parties, both internal parties, namely members and customers, as well as external parties such as the government in relation to cooperative income tax obligations and taxes of its management. A qualitative descriptive research method was conducted at Cooperatives in Cempaka Putih District, Central Jakarta, as many as 31 cooperatives with savings and loan business activities, product sales, and other services, for the purpose of obtaining information and an overview of the implementation of SAK ETAP by Cooperatives managed by BUMN, Regional Government, Private, and the Foundation in presenting annual financial reports, with descriptive analysis method. The results of the study stated that cooperatives managed by BUMN had implemented financial accounting standards set for cooperatives, namely SAK ETAP, cooperatives managed by regional governments, private companies and foundations had not fully implemented SAK ETAP in presenting their financial reports. The application of SAK ETAP which has not been fully implemented in cooperatives has an impact on the inaccuracy of cooperative tax calculation.*

**Keywords:** Cooperatives, Financial Statements, SAK ETAP, Cooperative Tax

---

Diterima;; Direvisi;; Disetujui:

How to cite:	Nama Author. (Tahun). Judul Artikel. Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi Kewirausahaan Vol X(Nomor):Halaman
E-ISSN:	
Published by:	

## PENDAHULUAN

Koperasi di Indonesia dalam perkembangannya mengalami pasang dan surut. Koperasi yang berkembang sejak zaman berdirinya koperasi sampai sekarang tidak ada yang tumbuh menjadi usaha yang besar. Koperasi merupakan badan usaha yang lebih dekat dengan rakyat, dan bahkan koperasi merupakan badan usaha yang sangat demokratis, karena koperasi dibentuk oleh anggota dan berazaskan kekeluargaan (Prasetyo & Suharyanto, 2019). Berbagai paket program bantuan dari pemerintah telah diberi untuk koperasi-koperasi di Indonesia seperti kredit program: KKop, Kredit Usaha Tani (KUT), pengalihan saham (satu persen) dari perusahaan besar ke koperasi, skim program KUK dari bank dan Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang merupakan kredit komersial dari perbankan, juga “paket program” dari Permodalan Nasional Madani (PNM), terus mengalir untuk memberdayakan gerakan ekonomi kerakyatan ini. Tak hanya bantuan program, ada institusi khusus yang menangani yaitu Menteri Negara Urusan Koperasi dan PKM (Pengusaha Kecil Menengah), yang seharusnya memacu gerakan ini untuk terus maju (Saraswati, 2016).

Menurut laporan Badan Pusat Statistik, perkembangan jumlah koperasi aktif di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Tercatat sejak 2006 hingga 2015, jumlah koperasi aktif di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada empat tahun terakhir, 2011 hingga 2015, rata-rata peningkatan jumlah koperasi aktif sebanyak 4.139 unit (Kopnus, 2016, 1). Jumlah koperasi di Jakarta keseluruhan sampai dengan tahun 2015 berjumlah lebih kurang 15.387 unit yang tersebar di beberapa wilayah Jakarta. Koperasi di Jakarta Pusat dan sekitarnya berjumlah 392 unit koperasi dengan jenis usaha yang beraneka ragam, yaitu usaha simpan pinjam, jasa parkir, toko, pembiayaan syariah, jasa rekanan dinas, perumahan, penjualan tiket, jasa pembersih, jasa pengelolaan wisma, jasa even organizer, jasa pengiriman, jasa rental, kantin dan sebagainya (Kopdit, 2015, 1).

Permasalahan koperasi yang timbul di Indonesia dapat dibedakan karena faktor internal dan eksternal (Febrianka, 2016). Faktor internal antara lain kebanyakan pengurus koperasi telah lanjut usia sehingga kapasitas kinerjanya terbatas, dan ketidakpercayaan anggota koperasi menimbulkan kesulitan dalam memulihkan ekonomi koperasi, serta administrasi kegiatan koperasi yang belum memenuhi standar akuntansi keuangan yang telah ditetapkan berakibat pada penyediaan data dan penyajian informasi keuangan menjadi tidak sesuai, sehingga pengambilan keputusan juga menjadi berbeda untuk para pemakai laporan keuangan tersebut. Sedangkan permasalahan eksternal terdiri dari bertambahnya persaingan dari badan usaha lain yang secara bebas memasuki bidang usaha yang sedang ditangani oleh koperasi, dicabutnya fasilitas-fasilitas tertentu sehingga koperasi tidak dapat menjalankan usahanya dengan baik, serta tanggapan masyarakat sendiri terhadap koperasi akibat ulah beberapa koperasi tertentu, yang melalaikan tanggungjawab tidak berkualitas jawabnya ke anggota atau yang berakibat merugikan pihak lain kepada costumernya yang menimbulkan ketidakpercayaan pada masyarakat tentang koperasi (Saraswati, 2016).

Informasi keuangan yang tidak berkualitas memungkinkan timbulnya moral hazard bagi satu pihak yang berakibat merugikan pihak lain (Dela, 2021). Laporan keuangan yang relevan dan andal dapat dihasilkan jika ada standar akuntansi, auditor yang berkualitas, serta praktik tata kelola yang baik diterapkan dalam entitas tersebut. Dimana menurut (Pongoh, 2013) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan salah satu sarana penting untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) untuk Koperasi dan UKM (Indonesia, 2016), memungkinkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan dapat menghasilkan informasi dan persepsi yang sama bagi semua yang berkepentingan baik pihak internal yaitu anggota dan nasabah

atau pelanggan maupun eksternal seperti pemerintah dalam hal kaitannya dengan kewajiban perpajakan penghasilan koperasi dan pajak para anggota dan pengurusnya.

Jika pengurus koperasi tidak dapat mengidentifikasi jenis penghasilan yang diterima koperasi dengan benar (Maharani, 2016), maka hal ini berdampak pada bagian yang menjadi hak para anggota dan pengurus serta kewajiban pada pemerintah kaitannya dengan pengenaan pajak penghasilan atasnya, sebab pada dasarnya semua penghasilan yang diterima koperasi adalah merupakan objek pajak penghasilan (PPh), kecuali dinyatakan lain dalam perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan pada permasalahan-permasalahan di atas yang bersumber pada hasil-hasil penelitian sebelumnya dan citra koperasi yang saat ini terus menjadi perhatian masyarakat karena ulah beberapa unit koperasi, dan masih banyaknya kesalahan dalam menentukan apa saja yang menjadi penghasilan usaha koperasi yang berdampak pada kesejahteraan anggota dan besarnya pengenaan pajak penghasilan yang menjadi penerimaan negara, maka dapat dirumuskan masalah utama dalam penelitian ini adalah "Apakah Penyajian Laporan Keuangan tahunan Koperasi sudah sesuai SAK ETAP dan bagaimana kaitannya dengan kewajiban pajak Koperasi" (Studi penelitian pada Koperasi di Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran dari variabel-variabel yang akan dilakukan penelitian, dengan objek penelitian adalah penerapan SAK ETAP dalam menyajikan laporan keuangan Koperasi di Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan metode survai, karena menurut (Sugiyono, 2019), metode survai digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), dalam pengumpulan data dengan tes, kuesioner wawancara, terstruktur dan sebagainya. Metode survai dalam penelitian ini adalah metode survai dengan cakupan waktu secara cross sectional, yang diarahkan untuk dapat membuat taksiran yang akurat mengenai karakteristik keseluruhan populasi pada waktu tertentu, atau untuk mengetahui hubungan komparatif beberapa subyek yang diteliti. Sumber data penelitian ini adalah data primer. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik sensus atas seluruh populasi koperasi di kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi lapangan dengan teknik wawancara dan observasi langsung. Pengumpulan data juga dilakukan melalui pengumpulan data dari literature yang berkaitan dan mendukung teori serta konsep penelitian serta referensi dan jurnal hasil penelitian terdahulu seperti disertasi, tesis dan skripsi, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dengan menggunakan program SPSS.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan kegiatan Penelitian pada Koperasi yang ada di wilayah Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat yaitu pada penelitian awal, telah dilakukan dengan mengumpulkan data jumlah Koperasi yang ada di sekitar wilayah Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, yaitu data dari Suku Dinas Koperasi dan UKM Jakarta Pusat. Berdasarkan data dari Suku Dinas Koperasi dan UKM Jakarta Pusat, terdaftar ada 31 unit Koperasi yang berada di wilayah Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat (data terlampir). Dari data tersebut tidak diinformasikan Koperasi yang masih aktif dan tidak aktif. Berdasarkan hasil survei di lapangan langsung ke sejumlah koperasi di wilayah Kecamatan

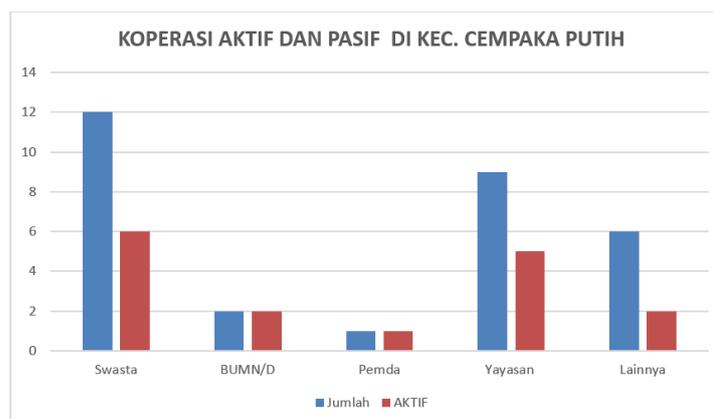
Cempaka Putih Jakarta Pusat, ternyata banyak koperasi yang sudah tutup atau tidak aktif yaitu sekitar 54 %. Yang aktif hanya sekitar 46 % atau sekitar 14 unit koperasi, yang dikelola oleh anak perusahaan BUMN, Swasta, Pemda dan Yayasan (Gambar 1).



**Gambar 1 Koperasi Aktif dan Pasif di Kecamatan Cempaka Putih**

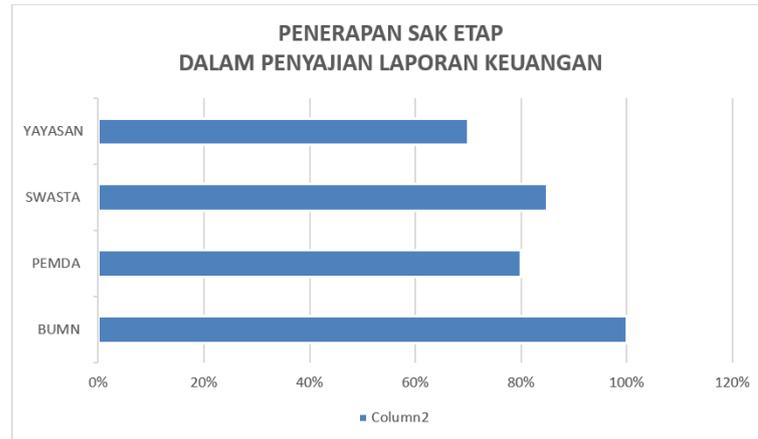
Rincian jumlah Koperasi yang aktif dan pasif di Kecamatan Cempaka Putih sebagai berikut ini :

- 1) Koperasi yang dikelola oleh anak perusahaan BUMN ada 2 unit
- 2) Koperasi yang dikelola oleh Pemda berjumlah 1 unit
- 3) Koperasi yang dikelola oleh Swasta ada 6 unit
- 4) Koperasi yang dikelola oleh Yayasan ada 5 unit



**Gambar 2 Jumlah Koperasi Aktif dan Pasif di Kec. Cempaka Putih**

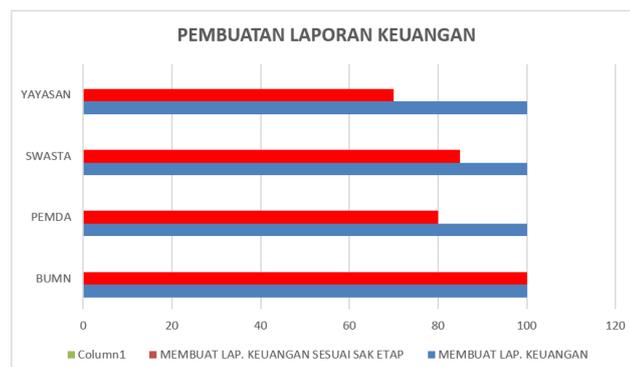
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi data dilapangan dengan pengurus koperasi khususnya yang menangani masalah pembukuan atau akuntansi berkaitan dengan penyajian laporan keuangan koperasi yang seharusnya dibuat sesuai standar akuntansi yang telah ditetapkan untuk koperasi yaitu SAK ETAP, maka hasil penelitian penerapan SAK ETAP untuk penyajian laporan keuangan pada koperasi yang ada di Kecamatan Cempaka Putih pembahasan dan gambarnya (Gambar 3 dan 4) sebagai berikut:



**Gambar 3 Penerapan SAK ETAP dalam Penyajian Laporan Keuangan Koperasi di Cempaka Putih**

Koperasi yang dikelola anak perusahaan BUMN, koperasi tersebut telah menerapkan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan untuk koperasi yaitu SAK ETAP, dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Koperasi yang dikelola oleh Pemda seperti Koperasi Pasar Jaya Cempaka Putih, belum sepenuhnya menerapkan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangannya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Saprida, 2015), pada Koperasi Petani KKH di Rokan Hulu, dan (Yulinartati, 2015), di Koperasi Usaha Dagang „Jember , dimana hasil penelitian mereka menyatakan Koperasi di Rokan Hulu dan Koperasi Usaha Dagang di Jember, belum sepenuhnya menerapkan SAK ETAP dalam menyusun laporan keuangan koperasi. Koperasi yang dikelola Swasta belum sepenuhnya menerapkan SAK ETAP dalam penyajian Keuangannya, khususnya koperasi yang bergerak dalam unit usaha simpan pinjam, hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Luh, 2015), pada Koperasi Simpan Pinjam di Lembing, yang menyatakan bahwa penerapan SAK ETAP mengakibatkan perubahan SHU dari tahun sebelumnya.

Koperasi yang dikelola oleh Yayasan masih belum sepenuhnya menerapkan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangannya, bentuk penyajian masih sederhana, hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Sakinah, 2017) pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Jakarta, yang menyatakan KSP Sejahtera Bersama belum sepenuhnya menerapkan SAK ETAP dalam menyajikan laporan keuangan. Kewajiban pembayaran pajak koperasi baik koperasi yang dikelola BUMN, Yayasan, Swasta, dan Pemda, telah dilakukan sesuai ketentuan perpajakan yang ditetapkan saat itu.



**Gambar 4 Pembuatan Laporan Keuangan Tahunan**

Laporan Keuangan Koperasi BUMN seperti Taspen harus diaudit , untuk itu laporan keuangan yang dibuat oleh koperasi harus sesuai dengan standar yang ditetapkan yaitu SAK ETAP, agar informasi yang disajikan tepat dan transparan serta tujuan koperasi untuk mensejahterakan anggotanya tercapai. Untuk itu opini audit akan diberikan Akuntan Publik jika laporan keuangan koperasi dibuat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Koperasi yang dikelola oleh Pemda seperti Koperasi PD Pasar Jaya telah membuat laporan keuangan setiap tahunnya, hanya saja laporan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan, hal ini terkendala dengan kompetensi SDM dan sosialisasi SAK ETAP yang masih kurang, khususnya dengan perhitungan penyusutan aset tetap yang besarnya masih belum sesuai dengan peraturan pajak dan metode penyusutan yang berlaku dipajak. Koperasi yang dikelola oleh Yayasan seperti Koperasi Karyawan Sejahtera Rumah Sakit Islam masih belum sepenuhnya menyajikan laporan keuangan sesuai SAK ETAP, hal ini karena terkendala dengan sosialisasi penerapan standar akuntansi tersebut yang masih kurang, dan kendala kompetensi, tetapi koperasi ini tetap membuat laporan keuangan tahunan. Untuk Koperasi yang di dirikan oleh pihak swasta bervariasi cara pembuatan laporan keuangannya, seperti Koperasi Nasari dan Sejahtera Bersama, intinya masih belum sepenuhnya menerapkan SAK ETAP dalam pembuatan laporan keuangan. Tetapi kewajiban pembayaran pajak koperasi tetap dilakukan sesuai ketentuan yang ada.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa koperasi yang ada di wilayah Kecamatan Cempaka Putih ternyata belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan yaitu SAK ETAP dalam menyajikan laporan keuangan tahunannya, khususnya untuk koperasi yang dikelola oleh Pemda, Swasta , dan Yayasan. Penerapan SAK ETAP yang belum sepenuhnya diterapkan dikoperasi akan berdampak pada ketidak benaran dalam perhitungan perpajakan, baik pajak koperasi maupun pajak pribadi (pengurus, dan karyawan), walaupun ada keringan pajak dari tarif semestinya , dan adanya tarif final 0,5 % tiap bulan yang harus disetorkan dari peredaran bruto, hal ini masih kurang berpengaruh pada pendapatan negara dari pajak jika informasi keuangan berupa laporan keuangan koperasi masih belum dibuat sesuai dengan standar pembuatan laporan keuangan yang ditetapkan yaitu SAK ETAP.

### BIBLIOGRAFI

- Dela, Y. (2021). *Analisis Strategi Pencegahan Moral Hazard Pada Calon Nasabah Pembiayaan Mudharabah Di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Febrianka, V. W. (2016). Kinerja Koperasi Studi Tentang Faktor-Faktor Penyebab Tidak Aktifnya Koperasi Gotong Royong Kota Blitar. *Kebijak. Dan Manaj. Publik*, 4(3), 1–11.
- Indonesia, I. A. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK- ETAP)*. Jakarta, IAI.
- Luh, N. (2015). *Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Pinjam Sejahtera Mandiri di Lembing*.
- Maharani, L. (2016). *Re Desain Laporan Keuangan Koperasi Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/PER/M. KUKM/IX/2015 (pada Koperasi Wanita Simpan Pinjam Srikandi)*. Universitas Katolik Darma Cendika Fakultas Ekonomi.

- Pongoh, M. (2013). Analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan PT. Bumi Resources Tbk. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Prasetyo, K., & Suharyanto, S. (2019). Rancang Bangun Sistem Informasi Koperasi Berbasis Web Pada Koperasi Ikitama Jakarta. *Jurnal Teknik Komputer*, 5(1), 119–126.
- Sakinah. (2017). *Analisis Penyusunan dan Penyajian laporan Keuangan pada Koperasi Simpan Pinajm dengan SAK ETAP ( KSP Sejahtera Bersama Jakarta)*.
- Saprida. (2015). *Akuntansi Koperasi berbasis SAK ETAP (Koperasi Petani KKH)*. Rokan Hulu.
- Saraswati. (2016). *Masalah-masalah yang timbul dalam Koperasi di Indonesia Saat ini*. <http://yunitasaraswati.blogspot.co.id/2014/11>
- Sugiyono, P. (2019). Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. *Alpabeta, Bandung*.
- Yulinartati. (2015). *Penerapan SAK ETAP pada Entitas Koperasi ( Koperasi Usaha Dagang/ KUD Trikarsa Jember)*.



**This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)**

---